

PROSEDUR PENERIMAAN PENDAPATAN RETRIBUSI PENGUNAAN LOKASI USAHA PADA DINAS PPKUKM DKI JAKARTA

Fadiana Chairunissa

ABSTRAK

Penerimaan pendapatan retribusi daerah adalah komponen dari Pendapatan Asli Daerah yang dapat mendukung pendapatan asli daerah sesuai dengan Peraturan Daerah (perda) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui prosedur penerimaan pendapatan retribusi penggunaan lokasi usaha yang dilakukan pada Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara studi pustaka sebagai sumber referensi, observasi, wawancara dan analisis serta sintesis. Hasil penulisan diperoleh bahwa secara umum Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan prosedur penerimaan pendapatan retribusi penggunaan lokasi sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2018 tentang pelaksanaan penerimaan pendapatan Daerah secara elektronik. Pemungutan dalam Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (SIMPAD) yaitu E-Retribusi. Saran untuk Dinas PPKUKM DKI Jakarta diharapkan bisa melaksanakan kegiatan pemungutan retribusi dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku serta tetap menjaga kelengkapan atas dokumen-dokumen yang terkait.

Kata Kunci : Prosedur, Penerimaan, Pendapatan, Retribusi Daerah.

**PROCEDURE FOR RECEIVING LEVY
INCOME USING BUSINESS LOCATIONS
AT DINAS PPKUKMDKI JAKARTA**

Fadiana Chairunissa

ABSTRACT

Regional retribution revenue receipts are is component from of Regional Original Revenue which can support regional original income in accordance with Regional Regulations issued by local governments. The purpose of this writing is to find out the procedure for receiving levy income from the use of business locations carried out at the DKI Jakarta Provincial PPKUKM Service in accordance with DKI Jakarta Provincial Governor Regulation Number 44 of 2018. The method used in this writing is descriptive analysis. To obtain the necessary data, the authors carry out data collection activities by way of literature study as a source of reference, observation, interviews and analysis and synthesis. The results of the writing show that in general the PPKUKM DKI Jakarta Provincial Office has implemented the procedure for receiving retribution revenue from the use of locations in accordance with DKI Jakarta Provincial Governor Regulation Number 44 of 2018 concerning the implementation of electronic regional revenue receipts. Collection in the Regional Original Revenue Management Information System (SIMPAD), namely E-Retribution. Suggestions for the DKI Jakarta PPKUKM Service are expected to be able to carry out retribution collection activities while still complying with applicable regulations and maintaining the completeness of related documents.

Keywords : *Procedure, Reception, Income, Regional Retribution*